

BAB II

GAMBARAN UMUM SOLO TECHNO PARK SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN SDM DAERAH

2.1 Kota Surakarta

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Surakarta memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta berfungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah pendukung (*hinterland*) yang berada pada kawasan Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Kota Surakarta sendiri merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Posisi Kota Surakarta berada pada jalur transportasi strategis yaitu pertemuan jalur transportasi darat antara Semarang dengan Yogyakarta (Joglo Semar), dan jalur Surabaya dengan Yogyakarta.

Kota Surakarta terletak di antara 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Di masing-masing batas kota terdapat Gapura Kasunanan yang didirikan sekitar

tahun 1931–1932 pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwana X di Kasunanan Surakarta. Gapura Kasunanan didirikan sebagai pembatas sekaligus pintu gerbang masuk ibu kota kerajaan (Kota Surakarta) dengan wilayah sekitar. Gapura Kasunanan tidak hanya didirikan di jalan penghubung, namun juga didirikan di pinggir sungai Bengawan Solo yang pada waktu itu menjadi dermaga dan tempat penyeberangan (di Mojo/Silir).

Ukuran Gapura Kasunanan terdiri dari dua ukuran yaitu berukuran besar dan kecil. Gapura Kasunanan ukuran besar didirikan di jalan besar. Gapura Kasunanan ukuran besar bisa dilihat di Grogol (selatan), Jajar (barat), dan Jurug (timur). Sedangkan Gapura Kasunanan ukuran kecil bisa dilihat di daerah RS Kandang Sapi (utara), jalan arah Baki di Solo Baru (selatan), Makamhaji (barat), dan di Mojo/Silir. Gapura Kasunanan besar juga memiliki prasasti waktu pendirian gapura.

Secara administrasi luas wilayah Kota Surakarta sebesar 44,04 Km², yang terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan sebesar 8,64 Km², Kecamatan Serengan sebesar 3,19 Km², Kecamatan Pasarkliwon sebesar 4,82 Km², Kecamatan Jebres sebesar 12,58 Km², Kecamatan Banjarsari sebesar 14,81 Km². Secara keseluruhan jumlah kelurahan di Kota Surakarta sebanyak 51

kelurahan, dengan jumlah RW sebanyak 604 RW, dan 2.714 RT.

Kelima kecamatan di Surakarta adalah:¹

- Kecamatan Pasar Kliwon : 9 kelurahan
- Kecamatan Jebres : 11 kelurahan
- Kecamatan Banjarsari : 13 kelurahan
- Kecamatan Laweyan : 11 kelurahan
- Kecamatan Serengan : 7 kelurahan

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kota Surakarta



Sumber: www.google.co.id

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta#Batas-batas_administrasi , pada pukul 23.05

2.1.2 Kondisi Topografi

Kota Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m dpl dan di pusat kota 95 m dpl, dengan luas 44,1 km² (0,14 % luas Jawa Tengah). Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat pemukiman sebesar 65%, sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar yaitu antara 16% dari luas lahan yang ada. Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta, 100 km tenggara Semarang dan 260 km barat daya Surabaya serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu (tinggi 3145 m) dan Merapi (tinggi 2930 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 3265 m) di bagian timur. Cukup jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes.

2.1.3 Kondisi Demografi

Dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, Kota Surakarta termasuk tiga besar kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Rendahnya laju pertumbuhan ini diperkirakan karena perkembangan Kota Surakarta yang cukup pesat dan ruang pengembangan di dalam Kota Surakarta sudah jenuh sehingga terjadi perpindahan penduduk ke kawasan pusat

kota yang kemudian berubah menjadi kegiatan untuk perdagangan dan jasa.

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 , Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016 mencapai 514.171 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,62; yang artinya bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 95 penduduk laki-laki.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2016

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jenis Kelamin (ribu) <i>Sex (thousand)</i>			Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Laweyan	42.987	45.627	88.614	0,94
2. Serengan	21.693	23.257	44.950	0,93
3. Pasar Kliwon	37.742	38.750	76.474	0,97
4. Jebres	68.673	73.479	142.152	0,93
5. Banjarsari	78.901	83.080	161.981	0,95
Surakarta	249.978	264.193	514.171	0,95

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2017

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja dengan total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun ke atas. Rasio penduduk yang bekerja cenderung menurun sejak tahun 2010 hingga dengan 2015. Berdasarkan data yang ada, rasio penduduk bekerja pada tahun 2010 mencapai 0,98. Hal

tersebut berarti di setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat 98 orang yang bekerja. Sedangkan rasio penduduk bekerja pada tahun 2015 mencapai 0,82 , artinya pada tahun 2015 di setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat 82 orang yang bekerja.

Tabel 2.2
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Angkatan Kerja	258.573	272.144	272.144	279.953	279.953	287.762
2	Jumlah Penduduk Bekerja	255.621	259.864	265.000	259.864	258.234	235.998
3	Rasio Penduduk Bekerja	0,98	0,95	0,97	0,93	0,92	0,82

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta 2017

Tingkat partisipasi tenaga kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), dua variabel utama bidang ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang membaik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan tren yang meningkat, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren yang menurun. Meskipun demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2011 sebesar 70,52%, mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 70,49%. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar

7,18%, dari tahun 2012 sebesar 6,10%. Namun, kecenderungan dari tahun 2010 hingga 2014 angka pengangguran mengalami penurunan.

Tabel 2.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Surakarta Tahun 2010-2014

No	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,81	70,52	70,49	72,57	74,65
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,73	6,40	6,10	7,18	6,08

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta 2016

Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Surakarta pada tahun 2016 mencapai 271.199, atau sebesar 52,95% dari seluruh penduduk kota Surakarta. Penduduk wanita yang bekerja mencapai angka sebesar 122.187 jiwa atau sebesar 45,05% dari penduduk yang bekerja. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan di kota Surakarta cukup tinggi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

Penduduk di Kota Surakarta tergolong majemuk yang ditempati oleh bermacam suku, selain suku Jawa terdapat pula penduduk yang beretnis Arab dan juga Tionghoa yang tinggal di Kota Surakarta. Perkampungan Tionghoa di Kota Surakarta lebih banyak berada di wilayah balong, Coyudan dan Keprabon. Sementara tiga wilayah kelurahan seperti Kelurahan Pasar Kliwon, Semanggi dan Kedung Lumbu di Kecamatan Pasar Kliwon dijadikan sebagai perkampungan Arab karena kelompok tersebut sudah di atur sejak zaman dahulu agar

menciptakan ketertiban dan keamanan untuk pengurusan etnis asing di Surakarta sehingga menjadi lebih mudah.

Jika dilihat dalam potensi daerah, Kota Surakarta tergolong sebagai kawasan industri. Industri batik menjadi salah satu cenderamata khas di Surakarta. Pusat kerajinan batik dan kerajinan keris antara lain berada di Laweyan dan Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia. Solo memiliki banyak sekali pasar tradisional seperti Pasar Klewer, Pasar Gedhe, Pasar Legi, Pasar Kembang dan Pasar Sangkrah. Terdapat pula pasar barang antik yang dapat dijadikan salah satu destinasi tujuan wisata, di antaranya Pasar Triwindu/Windu Jenar (setiap Sabtu malam diubah menjadi Pasar Ngarsopuro) serta Pasar Keris dan Cenderamata Alun-Alun Utara Keraton Solo.

Sentra bisnis Kota Solo sendiri terdapat pada Jl. Slamet Riyadi dimana di sepanjang jalan tersebut terdapat banyak perhotelan, pusat perbelanjaan, restoran internasional dan tempat wisata seperti Taman Sriwedari, Museum Radya Pustaka dan Museum Batik Danar Hadi.

2.1.4 Kondisi Iklim

Kondisi Iklim Kota Surakarta diklasifikasikan sebagai tropis. Surakarta memiliki curah hujan yang signifikan di hampir sebagian besar bulan, dengan musim kemarau singkat. Suhu udara rata-rata di Kota Surakarta pada Tahun 2016 berkisar antara 21,8°C sampai dengan

33,1°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 77 persen sampai dengan 95 persen.

Tabel 2.4
Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kota Surakarta, 2016

Bulan/ <i>Month</i>	Suhu Udara Temperature (°C)			Kelembaban Udara Humidity (%)
	Maks <i>Max</i>	Min	Rata-rata <i>Average</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Januari/ <i>January</i>	31,7	24,1	27,4	85
2. Februari/ <i>February</i>	31,5	23,9	26,5	95
3. Maret/ <i>March</i>	33,1	24,1	27,4	85
4. April/ <i>April</i>	32,9	24,6	27,9	82
5. Mei/ <i>May</i>	32,8	24,3	27,8	83
6. Juni/ <i>June</i>	32,3	23,7	26,9	83
7. Juli/ <i>July</i>	31,3	23	27,1	81
8. Agustus/ <i>August</i>	32,1	22,8	27	77
9. September/ <i>September</i>	30,7	21,8	27,5	78
10. Oktober/ <i>October</i>	31,9	23,5	27,3	80
11. November/ <i>November</i>	32,3	22,9	27,2	82
12. Desember/ <i>December</i>	30,2	22,3	26,6	83

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Adi Sumarmo 2017

2.1.5 Kondisi Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Nilai PDRB Kota Surakarta berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK 2010) menunjukkan peningkatan setiap

tahunnya. PDRB ADHK pada tahun 2015 tercatat sebesar 28,43 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 26,96 triliun rupiah. Secara kumulatif peningkatan PDRB ADHK 2010 dari tahun 2010 ke tahun 2015 mencapai RP 6,957 triliun rupiah.

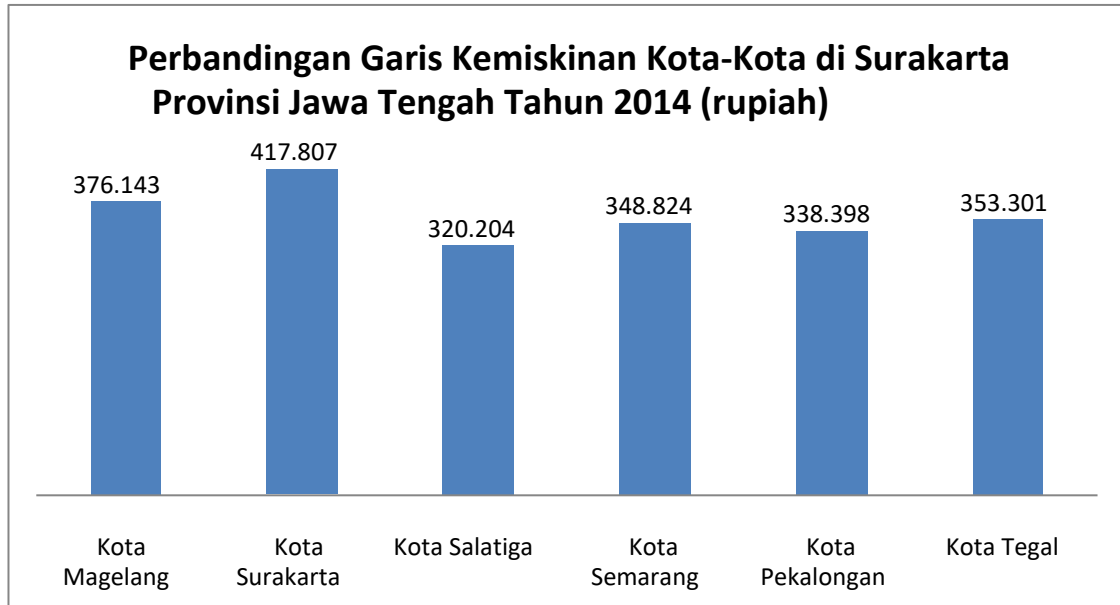
Kontribusi per sektoral atau kategori PDRB dari tahun 2010 sampai 2015 masih didominasi oleh sektor/kategori konstruksi, sektor/kategori perdagangan besar dan eceran, dan sektor/kategori komunikasi dan informasi. Pada tahun 2010, sektor/kategori menyumbang sebesar 27,06%, disusul perdagangan besar dan eceran sebesar 22,58% dan berikutnya sektor/kategori informasi dan komunikasi sebesar 11,36%. Meskipun merupakan sektor/kategori dominan selama lima tahun, namun kontribusi tiga sektor/kategori tersebut menunjukkan kecenderungan menurun. Sektor/kategori yang meningkat kontribusinya adalah sektor/kategori jasa keuangan dan asuransi meningkat dari 3,65% pada tahun 2010 menjadi 3,84% pada tahun 2015, serta sektor/kategori penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan perkembangan meningkat dari 4,87% pada tahun 2010 hingga menjadi 5,80% pada tahun 2015.

2.1.6 Kondisi Kesejahteraan Sosial

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah

maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan Kota Surakarta sebesar 417.807 Rp/kapita/bulan mengalami kenaikan dari tahun 2013, yaitu 403.121 Rp/kapita/bulan. Sementara itu, apabila disandingkan dengan garis kemiskinan kota lainnya di Jawa Tengah, garis kemiskinan Kota Surakarta tertinggi. Ini menunjukkan biaya hidup di Kota Surakarta lebih mahal jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2
Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014



Sumber: TKPK Provinsi Jawa Tengah, 2016

Penanganan PMKS di Kota Surakarta dapat dilihat dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan kebutuhan dasar. Pada tahun 2015 persentase PMKS yang mendapat bantuan pelayanan dasar sebesar 0,19%. Capaian ini sangat kecil, sedangkan jumlah sarana panti sampai dengan tahun 2015 sebesar 39 buah. Panti Asuhan yang melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial sampai dengan 2014 sebesar 100%.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kota Surakarta Tahun
2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	0,41	tad	8,16	0,16	17	0,13
2.	Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	14	12	8	6	11	0,19
3.	Persentase Panti Sosial skala Kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan Kesejahteraan sosial (%).	Tad	tad	5	5	5	25
4.	Persentase panti sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%).	Tad	tad	100	100	100	25
5.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	26	26	26	26	39	39
6.	Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti (%).	Tad	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta 2016

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Surakarta secara makro dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Data menunjukkan bahwa TPAK di Kota

Surakarta sejak tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun terakhir mengalami penurunan. TPT dari tahun 2010 mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2014 dengan nilai 6,16. Adapun indikator-indikator lain dari urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel 2.6. berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	Tad	15,1	48,2	28,9	50,91	72,1
2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	100	100	100	100	62,5
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	100	100	100	100	100	91,67
4.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	Tad	tad	Tad	tad	6,16	Tad
5.	Rasio penduduk yang bekerja	0,98	0,95	0,97	0,93	0,92	0,82
6.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	50,6%	51,58%	63,09%	70,62%	3,50	3,58
7.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,81	70,52*	70,49*	72,57*	74,65*	Tad
8.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	8,73	6,40*	6,10*	7,18*	6,08*	Tad
9.	Keselamatan dan perlindungan	52	51,58	63,09	70,62	71,68	74,53
10	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	100	100	100	78
11	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	67,24	74,23	72,03	74,51	72,32	76,63
12	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	76,71	70,03	68,26	70,50	63,08	50,39
13	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	14,77	17,64	14,03	11,98	11,15	18,48

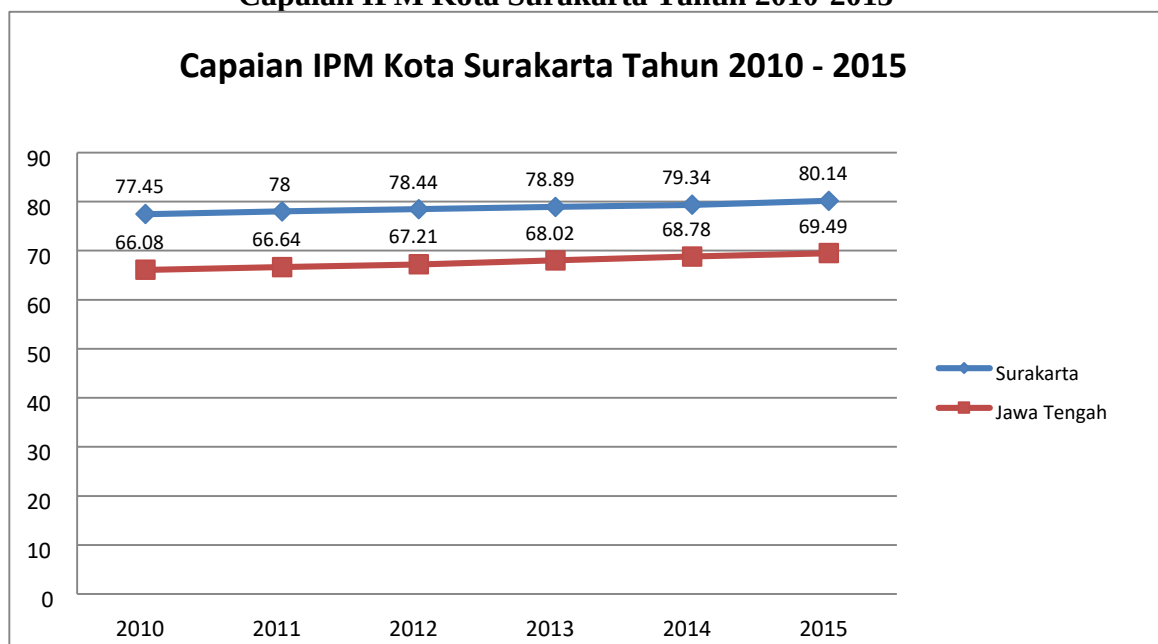
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta 2016

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka

Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya agar mencapai standar hidup layak.

IPM Kota Surakarta dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 IPM Kota Surakarta tercatat sebesar 77,45, meningkat menjadi 79,34 pada tahun 2014; dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 80,14 seperti terlihat pada Gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3
Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2010-2015



Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Surakarta 2016

Pemerintah Kota Surakarta harus terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Pendidikan dilihat dari kota Surakarta, merupakan sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan. Kota Surakarta memiliki 250 sekolah dasar dimana paling banyak terdapat di kecamatan Banjarsari yaitu 79 sekolah.

Dalam hal kesehatan, jumlah sarana kesehatan di Kota Surakarta pada tahun 2016 tidak mengalami perubahan dengan tahun yang lalu, hanya saja terdapat sedikit peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang ada seperti dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya.

2.1.7 Visi Kota Surakarta

**“TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA
BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”**

2.1.8 Misi Kota Surakarta

Waras: Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, dan rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat menuju masyarakat produktif, kreatif dan sejahtera serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat

Wasis: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkarakter dan berkontribusi kemajuan daya saing kota

Wareg: Mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota
Mapan: Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani

Papan: Mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan

2.2 *Solo Techno Park*

2.2.1 *Profil Solo Techno Park*

Solo Technopark adalah pusat vokasi dan inovasi teknologi, pusat riset teknologi terapan di Kota Surakarta, yang dibangun dari sinergi dan hubungan yang kokoh antara dunia pendidikan, bisnis, dan pemerintahan (*The Triple Helix Model of Innovation*) serta komunitas masyarakat.

Solo Techno Park memberikan layanan pendidikan bidang industri, inkubator bisnis, jasa produksi dan penelitian, pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan daya saing dan kinerja dunia usaha dan industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperluas lapangan pekerjaan melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Solo Techno Park sebagai unit kerja di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta No. 13 Tahun 2009 Tanggal 19 Agustus 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana. Tanggal 31 Desember 2009 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis *Solo Techno Park* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. Sehingga UPTB *Solo Techno Park* berstatus BLUD penuh dan sifat bisnisnya adalah sosial ekonomi serta lebih menekankan pada pelayanan sosial

kepada masyarakat sekaligus sebagai salah satu pusat rujukan layanan teknologi.

2.2.2 Visi *Solo Techno Park*

“*Solo Techno Park* (STP) menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia berstandart internasional dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi melalui kegiatan-kegiatan inovatif”

2.2.3 Misi *Solo Techno Park*

- Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan iptek;
- Membangun budaya inovatif, semangat kewirausahaan dan sadar mutu meningkatkan daya saing;
- Mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi.

2.2.4 Tujuan

- Memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang industri;
- Memberikan pelayanan penelitian, inovasi dan teknologi bagi UMKM.

2.3 BAPPEDA

2.3.1 Profil Bappeda

Bappeda Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Selanjutnya, dijabarkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-P tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;

3. Perencanaan penataan ruang dan prasarana kota;
4. Perencanaan bidang ekonomi;
5. Perencanaan bidang sosial budaya;
6. Pengelolaan data dan laporan;
7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
8. Penyelenggaraan sosialisasi;
9. Pengelolaan UPTB; dan
10. Pembinaan jabatan fungsional.

2.3.2 Visi Bappeda

“Mewujudkan perencanaan yang implementatif dan aspiratif berbasis data yang akurat.”

2.3.3 Misi Bappeda

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan berbasis karakteristik dan potensi kewilayahan
2. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi SDM perencana
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program dan kegiatan berbasis kebutuhan

4. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan
5. Meningkatkan pengelolaan sistem database perencanaan, pengendalian dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
6. Meningkatkan fungsi dan cakupan pelayanan Solo Technopark

2.4 ATMI

2.4.1 Profil ATMI

Politeknik ATMI Surakarta adalah institusi pendidikan tinggi yang berkonsentrasi pada pendidikan vokasi di bidang manufaktur (mesin industri) di Indonesia yang mengadopsi model pendidikan *dual system* dari Jerman dan Swiss. Politeknik ATMI Surakarta berdiri pertama kali pada tahun 1968 dengan nama ATMI (Akademi Teknik Mesin Industri) dan sejak berdiri telah menggunakan sistem pendidikan yang berbasis produksi atau PBET (*Production Based Education and Training*). Lulusan Politeknik ATMI Surakarta selalu disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri karena pendidikan di Politeknik ATMI Surakarta membekali mahasiswa menjadi ahli madya yang trampil dan berkarakter.

Politeknik ATMI adalah institusi pendidikan setingkat universitas di Indonesia yang pertama kali mendapat sertifikat penjaminan mutu

ISO dalam bidang edukasi dan produksi. Penjaminan mutu ISO 9001:2000 ini didapatkan sejak 21 September 2001 dan penerapannya selalu diaudit setiap tahunnya hingga sekarang. Pembaharuan standard ke ISO 9001:2008 telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2010 dengan nomor sertifikat 01 100 075858 dan 01 100 075859.

Politeknik ATMI memiliki 3 program studi, yakni: Teknik Mesin Industri, Teknik Mekatronika, serta Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin. Selain berfokus pada pendidikan dan produksi, Politeknik ATMI juga aktif dalam pelatihan/ training, menjadi konsultan politeknik dan program-program lain seperti I-Cell (*Business Incubator*), Bizdec (*consultancy*), Solo Techno Park (*teaching factory, training center*), dll. Cita-cita Politeknik ATMI adalah menjadi pusat pengembangan teknologi manufaktur terdepan di Indonesia dan memiliki pengaruh secara nasional maupun internasional. Saat ini Politeknik ATMI menjadi institusi pendidikan tinggi yang mempunyai pengaruh cukup besar pada pengembangan pendidikan professional di Indonesia, khususnya di bidang teknik dengan menggunakan metode *Production Based Education and Training*.²

² www.atmi.ac.id, diakses pukul 02.04

2.4.2 Visi ATMI

“Membangun masyarakat industri yang adil dan makmur, hormat akan martabat manusia dan bertanggung jawab atas keseimbangan lingkungan hidup melalui pendidikan”

2.4.3 Misi ATMI

Misi Politeknik ATMI Surakarta adalah mendidik kaum muda menjadi tenaga profesional yang memiliki kemampuan teknik dan tanggung jawab moral - sosial yang dirumuskan dalam *trilogy (3C)* : *competentia, conscientia, compassio*.

- ***Competentia*** : keunggulan yang tercermin dalam sikap disiplin tinggi, ketelitian dan konsistensi pada kualitas
- ***Conscientia*** : tanggung jawab moral
- ***Compassio*** : cinta kasih dan kepedulian